

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia di era globalisasi menyebabkan persaingan bisnis yang semakin ketat, berlomba-lomba untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kinerja perusahaan. Tujuan pesaing yang ingin mendapatkan pujian, diharapkan tetap memperhatikan agar selalu baik dan unggul walaupun dalam kondisi peraturan perusahaan yang semakin ketat. Oleh karena itu, komponen yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan salah satunya ialah laporan keuangan. Memiliki strategi bersaing yang baik, guna mengantisipasi kebangkrutan dengan upaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. *Corporate governance* merupakan pengelolaan perusahaan yang tepat dalam mengatur interaksi antar manajemen, pemegang saham, dewan komisaris, dan pemangku kepentingan.

Hubungan agensi antara pemegang saham dan manajer tersebut dijelaskan dalam teori keagenan. Prinsip utama teori keagenan ini menyatakan adanya hubungan kinerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer. Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga timbul biaya keagenan (Muliani, dkk 2019).

Indikator kinerja perusahaan dapat dilihat dari harga saham perusahaan dipasar. Kinerja perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan analisis *Tobin's q* yang dikenal juga dengan rasio *Tobin's q*. Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengambilan dari setiap rupiah investasi di masa depan (Wati, dkk 2022). *Tobin's q* digunakan untuk memberikan informasi lebih akurat, dengan memasukkan unsur-unsur kewajiban dan *total asset*. Dalam perhitungannya tidak hanya menghitung nilai pasar dari ekuitas tetapi juga menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang hasil pengambilan dari setiap nilai investasi.

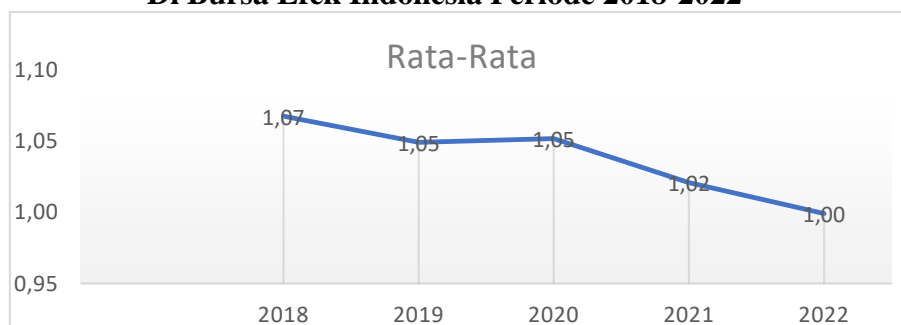
Mulai 25 Januari 2021, BEI mengimplementasikan klasifikasi baru atas sektor dan industri perusahaan tercatat yang bernama "*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*" atau IDX-IC. Perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) diklasifikasikan ke dalam 11 sektor antara lain sektor energi, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, kesehatan, keuangan, *properti* dan *real estate*, teknologi, infrastruktur, serta transportasi dan logistik (www.idx.co.id).

Pada tahun 2020 Indonesia mengalami sebuah peristiwa buruk yang melanda negara ini yaitu datangnya virus pandemi covid-19. Adanya pandemic ini membuat sektor perbankan mengalami masalah dalam stabilitas ekonominya. Selama periode 2020 hingga 2021, pertumbuhan laba perbankan Indonesia mengalami perlambatan, sehingga sangat penting untuk memahami berbagai elemen yang memengaruhi perkembangan laba guna meningkatkan

kinerja perusahaan dan meningkatkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba yang tinggi bukan berarti perusahaan tersebut efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan sebuah alat untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi terhadap perusahaan. Selain itu Laporan keuangan perusahaan, yang merupakan hasil dari proses menangkap dan meringkas data transaksi bisnis, dapat digunakan untuk memantau dan memperkirakan perkembangan laba di perusahaan, termasuk sektor keuangan.

Sektor keuangan terdiri dari beberapa sub sektor antara lain sub sektor perbankan, sub sektor lembaga pembiayaan, sub sektor perusahaan efek, sub sektor perbankan asuransi dan sub sektor lainnya. Dari kelima sub sektor tersebut, sub sektor perbankan memiliki historis dan konsistensi posisi pada index LQ45. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan sektor yang strategis bagi para investor untuk melakukan investasi karena kinerja perusahaan perbankan akan selalu diawasi dan dijamin oleh pemerintah melalui OJK dan BI sehingga perbankan senantiasa menjaga tingkat kesehatan bank dan kinerja perusahaan sesuai dengan peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh regulator (Zulfahri, dkk 2021).

Gambar 1.1
Rata – Rata Kinerja Perusahaan Rasio *Tobin's q*
Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022



Sumber: www.idx.co.id

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat pada tahun 2018 diketahui rata-rata *Tobin's q* perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 1,07, selanjutnya pada tahun 2019 hingga tahun 2020 tetap berada pada posisi 1,05, tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 1,02, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga mencapai 1,00. Hal ini berarti terjadi fenomena terkait rata – rata kinerja perusahaan rasio *tobin's q* perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022 terus mengalami penurunan. Apabila penurunan nilai perusahaan terus terjadi maka secara langsung berpengaruh dengan rendahnya harga saham sehingga investor tidak akan menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut.

Untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan terlebih dahulu harus mengelola perusahaannya dengan baik. Konsep dalam mengelola perusahaan ini sebagaimana yang sering disebut dengan tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* (CG) yang diartikan sebagai suatu sistem untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah (Ferial, *et al* 2016). Dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu 3 sistem untuk mengelola dan mengendalikan suatu korporasi atau perusahaan. Penerapan mekanisme GCG dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan dan meminimalkan terjadinya *fraud* (Negara, 2019).

Good Corporate Governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Konsep dari GCG dilatar

belakangi oleh masalah pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan di dalam perusahaan, yang selanjutnya dimodelkan dengan mekanisme GCG, pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan upaya yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan penerapan *good corporate governance* dimungkinkan untuk menyamakan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, sedangkan pengawasan terhadap perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan (Fauzi, *et al* 2016).

Menurut Forum for *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *good corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *good corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) (Mutmainah, 2015). *Good corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan kepada investor, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menyalurkan modal yang telah investor tanamkan ke proyek-proyek yang tidak menguntungkan, dan bagaimana para investor dalam mengontrol para manajer dalam mengoperasikan perusahaan.

Konsep *good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam *good corporate governance* terdapat dua hal yang sangat ditekankan yakni, pertama pentingnya memenuhi hak pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dalam memperoleh informasi yang benar dan tepat pada waktunya, kedua kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi-informasi kepada pemangku kepentingan lain perusahaan dengan cepat, tepat, dan akurat.

Perusahaan yang menjalankan mekanisme *good corporate governance* membutuhkan dewan pengawas yang dapat mengawasi tindakan-tindakan direktur secara langsung sebagai bagian dari internal perusahaan agar direktur tidak berlaku sewenang-wenang, dalam hal ini adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen berperan penting dalam memastikan strategi dan kinerja perusahaan diatur oleh manajer perusahaan dengan benar dan tidak merugikan kepentingan pemegang saham, atau *stakeholder* pada umumnya, karena dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan kecuali karena sebagai profesional yang bekerja untuk mengawasi kinerja perusahaan, maka dewan komisaris independen bebas untuk menegur manajer perusahaan ketika mereka membuat keputusan yang memungkinkan berbahaya bagi keberlangsungan perusahaan.

Dewan komisaris independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan

(Novitasari, 2017). Sejalan dengan hasil penelitian (Maulana, 2020), (Desmiza, 2023) dan (Suri, dkk 2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, berbeda dengan hasil penelitian (Laiya, dkk 2023) dan (Hafizah, 2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang diangkat oleh RUPS dan bertugas melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam mencapai tujuan perusahaan (Sukandar, 2017). Dewan direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor. Sejalan dengan hasil penelitian (Kusmaningrum dan Nugroho, 2019), (Rusnaldi, dkk 2020) dan (Umbing, dkk 2020) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, berbeda dengan hasil penelitian (Saadah, 2020) dan (Purnomo, dkk 2021) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Dewan komisaris dihitung dengan menggunakan total jumlah anggota dewan komisaris di perusahaan. Mekanisme (pengendalian) internal dalam perusahaan antara lain struktur kepemilikan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam hal ini komposisi dewan (Dewi, *et al* 2019). Sejalan dengan hasil penelitian (Susmanto, dkk 2021), (Permono dan Puspaningsih, 2022) dan (Dewi dan

Widhiyani, 2023) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, berbeda dengan hasil penelitian (Pudjonggi dan Yuliati, 2022) dan (Ariska dan Utomo, 2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Komite audit bertugas menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya sehingga laporan keuangan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas dan karakteristik komite audit (Novitasari, 2017). Komite audit harus memiliki setidaknya paling kurang terdiri dari tiga orang. Kehadiran komite audit sekarang ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan memperhatikan kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Sifat *opportunistic* bisa dikurangi dengan mengawasi laporan keuangan manajemen dengan melakukan manajemen laba serta hal lainnya yang dapat merugikan perusahaan dengan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Sitanggang, 2021). Sejalan dengan hasil penelitian (Widiatami, dkk 2023), (Addina, dkk 2023) dan (Tanto, 2021) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, berbeda dengan hasil penelitian (Indrastuti, 2021) dan (Prasetyo, dkk 2020) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh badan usaha. Kepemilikan institusional dapat bertindak sebagai pengawas perusahaan. Adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih baik terhadap perusahaan karena akan lebih mudah

bagi sebuah perusahaan yang besar untuk mengawasi dibanding investor ritail. karena kepemilikan saham mewakili kuasa yang dapat digunakan untuk menunjuk atau memberhentikan direktur jika kinerja perusahaan buruk. Dengan demikian manajer akan sebisa mungkin agar menjalankan perusahaan sebaik-baiknya agar kinerja perusahaan menjadi baik. Sejalan dengan hasil penelitian (Hartati, 2020), (Gunawan dan Wijaya, 2020) dan (Mattiara, dkk 2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, berbeda dengan hasil penelitian (Rahayu dan Yudowati, 2021) dan (Amaliyah dan Herwiyati, 2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana tingkat keberhasilan perusahaan dalam menerapkan *good corporate governance* (Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional) serta pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan sektor perbankan. Penulis merasa tertarik untuk menulis proposal dengan judul: **“Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Perbankan yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022”**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah :

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor perbankan yang *Listing* di BEI pada tahun 2020-2022?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor perbankan yang *Listing* di BEI pada tahun 2020-2022?
3. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor perbankan yang *Listing* di BEI pada tahun 2020-2022?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor perbankan yang *Listing* di BEI pada tahun 2020-2022?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor perbankan yang *Listing* di BEI pada tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang disajikan penulis, tujuan dari penelitian tersebut adalah :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan sektor perbankan yang *Listing* di BEI pada tahun 2020-2022.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh dewan direksi terhadap kinerja perusahaan sektor perbankan yang *Listing* di BEI pada tahun 2020-2022.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan sektor perbankan yang *Listing* di BEI pada tahun 2020-2022.

4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan sektor perbankan yang *Listing* di BEI pada tahun 2020-2022.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan sektor perbankan yang *Listing* di BEI pada tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang mungkin akan melakukan penelitian yang sejenis, untuk memperluas informasi tentang kinerja perusahaan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis yaitu teori yang didapatkan selama perkuliahan dapat lebih dipahami dengan adanya praktek nyata.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan bahan masukan, sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan agar dapat menjadi evaluasi dimasa yang akan datang oleh pembuat kebijakan pasar modal, khususnya yang berhubungan dengan kinerja perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agen*. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena manajemen dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

(Jensen dan Meckling, 1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada *agen*.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada *agen* membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini *agen* akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan *principal*.

Masalah keagenan potensial terjadi apabila bagian kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari seratus persen (Masdupi, 2005).

Dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memaksimalkan perusahaan. Inilah yang nantinya akan menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*). (Jensen dan Meckling, 1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap *agen*. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara pemegang saham dengan manajer.

Menurut teori keagenan, konflik antara *principal* dan *agen* dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara *principal* dan *agen*. Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial (*insider ownership*) dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* yang berpotensi timbul, karena dengan memiliki saham perusahaan diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Proses ini dinamakan dengan *bonding mechanism*, yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan.

Suatu perusahaan, konflik kepentingan antara *principal* dengan *agen* salah satunya dapat timbul karena adanya kelebihan aliran kas (*excess cash flow*). Kelebihan arus kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Ini menyebabkan

perbedaan kepentingan karena pemegang saham lebih menyukai investasi yang berisiko tinggi yang juga menghasilkan *return* tinggi, sementara manajemen lebih memilih investasi dengan risiko yang lebih rendah.

Menurut (Bathala, *et al* 1994) terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan, yaitu : a) meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (*insider ownership*), b) meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih (*earning after tax*), c) meningkatkan sumber pendanaan melalui utang, d) kepemilikan saham oleh institusi (*institutional holdings*).

Sedangkan dalam penelitian (Masdupi, 2005) dikemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengurangi masalah keagenan. Pertama, dengan meningkatkan *insider ownership*. Perusahaan meningkatkan bagian kepemilikan manajemen untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan meningkatkan persentase kepemilikan, manajer menjadi termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

Kedua, dengan pendekatan pengawasan eksternal yang dilakukan melalui penggunaan hutang. Penambahan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi penggunaan saham sehingga meminimalisasi biaya keagenan ekuitas. Akan tetapi, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan membayarkan beban bunga secara periodik. Selain itu penggunaan hutang yang terlalu besar juga akan menimbulkan

konflik keagenan antara *shareholders* dengan *debtholders* sehingga memunculkan biaya keagenan hutang.

2.1.2 Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab/ mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menunjukkan perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) adalah konsep yang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

Corporate Governance mengacu pada metode organisasi yang diatur, di administrasikan, di arahkan atau di kendalikan, dan tujuan untuk yang diatur. Berbagai peserta, yang memiliki kepentingan dalam organisasi, menentukan arah dan kinerja organisasi. Peserta utama adalah pemegang saham, manajemen dan dewan direksi (Dellaportas, 2005).

2.1.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Alasan utama yang dikemukakan para pakar tentang perlunya menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah bahwa prinsip-prinsip GCG diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan perusahaan. GCG dapat dilakukan melalui pembentukan komite audit, peningkatan transparansi informasi, keberadaan komisaris independen, meningkatkan hubungan dengan investor, dan pemberian remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan (Kusmayadi, Rudiana, dan Badruzaman, 2015). Menurut (Wilson Arafat, 2008) GCG dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Meningkatkan nilai perusahaan.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

2.1.4 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Unsur-unsur *Good Corporate Governance* menurut (Widjaja Tunggal, 2013; 184) terdiri dari :

1. Komisaris dan Direksi

Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penetapan sasaran atau tujuan dari korporat, mengembangkan kebijakan serta memilih tim manajemen puncak untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu Komisaris dan Direksi memiliki tugas untuk menelaah situasi perusahaan apakah telah sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Komite Audit

Tugas dari komite audit adalah memberikan pendapat atau rekomendasi profesional kepada dewan komisaris tentang situasi tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh manajemen perusahaan.

3. Sekretaris perusahaan

Sekretaris adalah pihak penghubung yang menjembatani antara kepentingan perusahaan dengan pihak eksternal dalam rangka menjaga persepsi publik atas citra perusahaan dan pemenuhan tanggung jawab perusahaan. Pertanggung jawaban sekretaris perusahaan adalah kepada direksi.

4. Manajer

Peran manajer di dalam operasional sangatlah penting bagi perusahaan. Oleh sebab itu seorang manajer harus memiliki pengetahuan yang luas tentang hal teknis yang yang terkait dengan perusahaan.

5. Auditor Eksternal (*Independent*)

Tanggung jawab Auditor Eksternal adalah memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Laporan Auditor Eksternal merupakan opini profesional tentang laporan keuangan perusahaan.

6. Auditor Internal

Tugas dari Auditor Internal adalah memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada pihak-pihak berwenang di dalam perusahaan tentang situasi yang terjadi didalam perusahaan.

2.1.5 Prinsip *Good Corporate Governance*

Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan No.11/33/PBI/2009 bahwa prinsip-prinsip dalam GCG harus menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Hal ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berikut uraian prinsip-prinsip GCG yang berlaku secara umum:

1. Transparansi

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders*. Transparansi (*tranparency*) mengandung unsur pengungkapan (*discloure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan secara mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Prinsip transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas

Prinsip dasar akuntabilitas (*accountability*) bagi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan.

3. Independensi

Prinsip dasar independensi (*independency*) dalam pelaksanaan GCG bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

4. Kewajaran

Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas. Terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dari tindakan kecurangan.

5. Responsibilitas

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Prinsip dasar responsibilitas (*responsibility*), pada prinsipnya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat

terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam hal ini tanggung jawab mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial.

2.1.6 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut keputusan menteri No.PER-01/MBU/2011 terdapat 6 (enam) tujuan dalam penerapan GCG, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai normal yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para pemangku kepentingan ataupun kelestarian lingkungan disekitar perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Menyukseskan program privatisasi.

2.1.7 Pengertian Kinerja Perusahaan

Kinerja dari suatu perusahaan adalah gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan yang kemudian dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan yang memperlihatkan prestasi dari kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan perusahaan sangatlah penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal. Penilaian tersebut adalah cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar kewajiban terhadap para penyandang dana terpenuhi dan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan tercapai.

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui kualitas manajemen organisasi maupun manajemen keuangan suatu perusahaan. Menurut (Mulyadi, 2001) tujuan penilaian kinerja perusahaan adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Standar perilaku tersebut adalah kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Tobin's q dapat dikatakan sebagai rasio penilaian dikarenakan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar. Menurut (Sudiyanto, 2010) *Tobin's Q* adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan melalui potensi perkembangan harga saham, potensi kemampuan manajer dalam mengelola aktiva perusahaan dan potensi pertumbuhan investasi. Kelebihan *Tobin's q* jika dibandingkan dengan rasio penilaian lainnya adalah rasio yang tidak

hanya mengukur keadaan perusahaan di pasar melalui harga saham yang beredar dan jumlah saham yang beredar, tetapi juga mengukur aktiva dan kewajiban yang ada pada perusahaan, sedangkan rasio penilaian lainnya hanya mengukur keadaan perusahaan dilihat dari saham dan harga saham yang dimiliki.

2.1.8 Pengertian Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka dewan komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi tersebut.
- b. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.

- c. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- d. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- e. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
- f. Memastikan prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

2.1.9 Pengertian Dewan Direksi

Umumnya, di Indonesia *dewan direksi* adalah dewan eksekutif, sedangkan di negara barat, *board of directors* adalah dewan pengawas. Istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dewan pengawas (biasanya disebut dewan komisaris) dan dewan eksekutif (biasanya disebut dewan direksi) untuk menghindari kekeliruan karena penggunaan istilah dewan direksi di Indonesia bisa mengacu ke salah satu fungsi dari kedua dewan tersebut.

Di beberapa perusahaan di Amerika Serikat yang memiliki satu dewan saja, biasanya tugas dan tanggung jawab kedua dewan tersebut dijadikan satu dalam dewan direksi, yang beranggotakan direksi dalam (di Indonesia dinamakan komisaris) dan direksi luar (di Indonesia dinamakan komisaris independen).

Kegiatan dewan pengawas ditentukan oleh kekuasaan, tugas-tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh suatu otoritas yang berada diluarnya. Biasanya, hal-hal ini dijelaskan dalam anggaran dasar (AD) organisasi tersebut. Anggaran dasar biasanya juga menyebutkan jumlah anggota dewan, bagaimana anggota dewan dipilih, dan kapan anggota dewan mengadakan pertemuan.

2.1.10 Pengertian Dewan Komisaris

Dewan Komisaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT 1995), *Code of Conduct*, dan peraturan-peraturan khusus tertentu lainnya. Dewan komisaris dalam *One Tier System (Anglo Saxon)* dan dalam *Two Tiers System (Kontinental Eropa)*.

Berkenaan dengan bentuk Dewan dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu *anglo saxon* dan dari kontinental Eropa. Sistem hukum *anglo saxon* mempunyai sistem satu tingkat atau *one tier system*. Di sini perusahaan hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif). Pada dasarnya yang disebut belakangan ini diangkat karena kebijakannya, pengalamannya dan relasinya. Negara-negara dengan *One Tier System* misalnya Amerika Serikat dan Inggris.

Dewan Komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi

dengan pihak ketiga. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Karena sistem hukum Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda, maka hukum perusahaan Indonesia menganut *Two Tiers System* untuk struktur dewan dalam perusahaan.

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Franita, 2018). Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Lebih lanjut tugas-tugas utama Dewan Komisaris meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan (OECD *Principles of Corporate Governance*).

2.1.11 Pengertian Komite Audit

Pembentukan komite audit oleh perusahaan-perusahaan publik sudah banyak dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Seiring dengan menguatnya tuntutan agar perusahaan lebih transparan dan *reliabel* mengenai kinerjanya, peran komite audit menjadi semakin penting. Berikut pengertian komite audit dari beberapa ahli:

Menurut Bapepam No. Kep-29/M/2004 yang dikutip oleh Amin (2008:49), menjelaskan pengertian komite audit sebagai berikut : “Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”.

Menurut Ikatan Komite Audit yang di kutip oleh (Arief, 2009: 25), menjelaskan definisi Komite Audit sebagai berikut : “Suatu komite yang

bekerja secara profesional dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *Corporate Governance* di perusahaan-perusahaan”.

Meskipun pendapat mengenai definisi komite audit menurut beberapa ahli berbeda-beda tetapi memiliki maksud yang sama yaitu komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja sama untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.1.12 Pengertian Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan perwujudan dari prinsip *Good Corporate Governance*. Dengan kepemilikan institusional di luar perusahaan dalam jumlah yang signifikan akan menyebabkan pihak luar perusahaan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen. Bagi manajemen, pengawasan oleh pihak luar mendorong manajemen untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan melakukan pengelolaan secara transparan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan

pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai *agen* pengawas ditekankan melalui investasi yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Investor institusional memiliki peranan yang penting dalam menciptakan sistem *corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan, dimana investor institusional dapat secara independen mengawasi tindakan manajemen dan memiliki *voting power* untuk mengadakan perubahan pada saat manajemen sudah dianggap tidak efektif lagi dalam mengelola perusahaan (Hidayati dan Retnani, 2020).

Institusional *shareholders* dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Menurut penelitian (Wening, 2018) semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

- 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya dijadikan sebagai perbandingan penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian tersebut juga diharapkan dapat menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*). Penelitian yang dijadikan referensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Addina, dkk (2023) penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial dan simultan. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara simultan proporsi komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh proporsi komisaris independen dan komite audit sebesar 78,37%, sedangkan sisanya 21,63% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel komite audit sebagai variabel independen dan menggunakan jenis data kuantitatif. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan lokasi perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian Addina, dkk (2023) menggunakan lokasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Desmiza (2023) salah satu indikator kinerja perusahaan adalah Tobin's Q, oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk mengelolanya secara efektif dan efisien. Tobin's Q dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menyelidiki pengaruh tata kelola perusahaan struktur yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan jumlah komisaris pada nilai perusahaan (Tobin's Q). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif, menggunakan regresi data panel berganda alat analisis dengan program eviews 10. Hasil penelitian membuktikan hal itu kepemilikan institusional, komisaris independen, dan jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap Tobin's Q. Namun untuk variabel jumlah dewan komisaris merupakan anomali terjadi, dimana hasilnya bertentangan dengan hipotesis. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel yaitu kinerja perusahaan dengan rasio tobin's q dan sama-sama menggunakan variabel kepemilikan institusional. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sedangkan penelitian tersebut menggunakan regresi data panel berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Widhiyani (2023) mengenai kinerja perusahaan merupakan tolok ukur untuk menilai keberhasilan amanajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan penelitian adalah membuktikan secara empiris pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* pada kinerja perusahaan. Penelitian dilakukan pada 20 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2020. Pemilihan sampel

perusahaan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Kinerja perusahaan diukur dengan *Return on Assets* dan *Good Corporate Governance* diukur dengan indikator dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel dewan komisaris, kepemilikan institusional dan komite audit. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan lokasi perusahaan sektor perbankan sedangkan penelitian tersebut menggunakan perusahaan BUMN. Perbedaan lainnya yaitu pada periode penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiatami, dkk (2023) mengenai sektor pariwisata memiliki peran sebagai penyumbang melalui negara perolehan devisa dalam perekonomian Indonesia. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang signifikan pada wisatawan mancanegara kunjungan ke daerah wisata di Indonesia. Namun, saat Covid-19 Pandemi melanda Indonesia, melumpuhkan hampir semua industri di Indonesia. Fenomena ini mempengaruhi kinerja perusahaan, termasuk industri pariwisata. Kinerja perusahaan adalah sebuah gambaran kegiatan perusahaan dalam menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik adalah tidak terlepas dari peran tata kelola perusahaan atau dalam istilah lain

tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji tentang mekanisme *Good Corporate Governance* yaitu gender keragaman, dewan komisaris, dan komite audit pada kinerja perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan *purposive sampling* teknik untuk mendapatkan jumlah sampel adalah 114 sampel dari perusahaan sub sektor pariwisata dan transportasi tahun 2019-2021. Teknik analisis data penelitian tersebut menggunakan regresi berganda analisis, yang diproses dengan bantuan WarpPLS 8.0. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberagaman *gender*, dewan komisaris, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan akomodasi di bidang pariwisata dan sub sektor transportasi. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel dewan komisaris, komite audit dan kinerja perusahaan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan periode penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Laiya, dkk (2023) penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur menggunakan dewan direksi, komite audit dan dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan *Tobin's q*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Populasi penelitian tersebut adalah perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 dengan 34 sampel perusahaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu uji asumsi klasik, pengujian

hipotesis dan pengujian dengan regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) Secara parsial, dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. 2) Secara parsial, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 3) Secara parsial, dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 4) Sedangkan secara simultan menunjukkan dewan direksi, komite audit dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan dewan direksi, komite audit dan dewan komisaris independen. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah populasi dan periode penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Permono dan Puspaningsih (2022) tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Tata kelola perusahaan terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Kinerja perusahaan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah ROA. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Metode pengambilan sampel dalam penelitian tersebut menggunakan *purposive sampling*, dipilih 30 perusahaan sebagai sampel. Instrumen analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan dewan

komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan mempengaruhinya. Orisinalitas dalam penelitian tersebut terdapat pada variabel ukuran perusahaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah ROA. Perbedaan lainnya yaitu sampel yang digunakan dan tahun penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariska dan Utomo (2021) Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji efek kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Perusahaan sektor manufaktur barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia menjadi sampel dalam penelitian tersebut dengan periode 2015-2019. Analisis data menggunakan metode statistik. Hasil penelitian menunjukkan Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara Dewan komisaris Independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, Likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan. Penelitian tersebut memberikan implikasi bahwa peningkatan monitoring dari pemegang saham institusional dan peningkatan profitabilitas sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu perusahaan harus tetap meningkatkan peran pengawasan dewan komisaris independen dan menjaga tingkat likuiditas agar memiliki keunggulan dalam jangka panjang. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan

kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lokasi perusahaan dan periode penelitian yang berbeda. Perbedaan lainnya yaitu penelitian tersebut menambahkan variabel profitabilitas dan likuiditas.

Penelitian yang dilakukan oleh Tanto (2021) Pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan *good corporate governance* masih menjadi masalah besar selama pasca-periode krisis keuangan di pasar Asia yang berkembang seperti Indonesia. Terutama lembaga keuangan telah menerapkan reformasi tata kelola perusahaan untuk meningkatkan perlindungan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder*. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh elemen-elemen dalam penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan pada sektor perbankan di Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan-perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian adalah Dewan komisaris, Dewan direksi tidak berpengaruh dan Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan perusahaan sektor perbankan dan menggunakan metode analisis regresi berganda. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menggunakan kinerja perusahaan

sedangkan penelitian tersebut menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel terikat.

Penelitian yang dilakukan oleh Susmanto, dkk (2021) dalam mekanisme *corporate governance*, dewan komisaris dengan karakteristiknya mempunyai peran yang strategis untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui proses pengawasan terhadap jalannya pengurusan perusahaan oleh direksi. Penelitian tersebut bertujuan menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan (ROE dan *Tobin's q*) pada BUMN persero terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Dengan menggunakan analisis regresi data panel, diperoleh hasil bahwa jumlah komisaris independen dan usia anggota dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan (ROE dan *Tobin's q*), sedangkan untuk tingkat pendidikan anggota dewan komisaris dan rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap ROE, tetapi berpengaruh negatif terhadap *Tobin's q*. Jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, tetapi berpengaruh positif terhadap *Tobin's q*. Temuan penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan kepada pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN bagi perbaikan pengaturan mekanisme *corporate governance* khususnya pada aspek dewan komisaris. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan indikator GCG yaitu dewan komisaris. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan analisis regresi data panel sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan

lainnya yaitu penelitian tersebut menggunakan analisis perusahaan yang digunakan dan periode penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo, dkk (2021) penelitian tersebut bertujuan untuk membuktikan pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan publik dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 49 yang telah memenuhi kriteria. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Kinerja perusahaan dalam penelitian tersebut diukur dengan menggunakan *Return On Equity (ROE)*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dewan direksi, kepemilikan publik dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sedangkan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan dewan direksi dan kepemilikan institusional. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kinerja perusahaan dalam penelitian tersebut diukur dengan ROE sedangkan penelitian ini menggunakan Tobin's Q. Perbedaan lainnya yaitu pada lokasi dan periode penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Yudowati (2021) kinerja perusahaan adalah salah satu ukuran pada perusahaan dalam melaksanakan fungsi keuangan. Pengukuran kinerja perusahaan dalam penelitian tersebut menggunakan rasio pasar *Tobin's q*. Dengan menggunakan rasio *Tobin's q* dapat

diketahui bagaimana kinerja perusahaan dinilai oleh pasar termasuk penilaian oleh investor. Salah satu faktor yang dapat memiliki pengaruh pada kinerja perusahaan adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan terdiri dari konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Besaran proporsi kepemilikan pada perusahaan dapat menjadi penentuan baik buruknya kinerja perusahaan. Penelitian tersebut dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan dan parsial antara struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan keluarga sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Struktur kepemilikan yang diteliti terdiri dari konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Hasil dari penelitian tersebut, menunjukkan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sementara secara simultan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan kinerja perusahaan yang diukur menggunakan tobin's q sebagai variabel terikat dan menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel bebas. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lokasi dan periode penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Indrastuti (2021) mengenai nilai perusahaan adalah hal penting bagi perusahaan karena berdampak pada ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Perusahaan. Perusahaan berharap dapat

meningkatkan nilai perusahaan agar dapat memakmurkan pemegang saham. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mendapat bukti empiris mengenai faktor determinan yang mempengaruhi nilai perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 – 2019. Faktor determinan yang digunakan sebagai variabel independen adalah likuiditas, *leverage*, profitabilitas, komisaris independen, komite audit dan umur perusahaan. Dengan teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling method*, diperoleh 70 perusahaan sebagai sample penelitian dengan 280 data penelitian. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda, dengan hasil penelitian adalah likuiditas, profitabilitas dan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan *leverage*, komite audit dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan komite audit dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lokasi dan periode penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Wijaya (2020) penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Teknik pemilihan sampel yang dilakukan dalam penelitian tersebut menggunakan *teknik purposive sampling* dimana sampel yang dipilih didasari pada berbagai pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria yang ditentukan, maka peneliti memperoleh 38

perusahaan manufaktur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan kepemilikan institusional dan kinerja perusahaan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lokasi perusahaan dan periode penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Hafizah (2020) Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Populasi pada penelitian tersebut adalah Perusahaan sub sektor *Property and Real Estate* tahun 2016-2018 yang berjumlah 154 perusahaan. Sampel dipilih dari metode *purposive sampling* dan mendapatkan sampel 141 perusahaan dari beberapa kriteria. Sumber data adalah data sekunder dari website (www.idx.co.id). Riset ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 20. Hasil dari riset ini menunjukkan Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan kepemilikan institusional dan komite audit sebagai variabel bebas. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan nilai perusahaan sedangkan penelitian ini

menggunakan kinerja perusahaan sebagai variabel terikat. Perbedaan lainnya yaitu lokasi perusahaan dan periode penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2020) dalam mencapai tujuan, suatu perusahaan tentunya harus memperhatikan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor *Property, Real Estate* dan *Building Construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Terdapat 43 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dari hasil penelitian diketahui ukuran dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan komite audit dan kepemilikan institusional sebagai variabel bebas serta menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan kinerja keuangan sedangkan penelitian ini menggunakan kinerja perusahaan sebagai variabel terikat. Perbedaan lainnya yaitu lokasi perusahaan dan periode penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Mattiara, dkk (2020) mengenai kinerja keuangan merupakan usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mengukur keberhasilan dan sehatnya perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat terlihat pertumbuhan, potensi sekaligus perkembangan suatu

perusahaan dalam mencapai tujuan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Penelitian tersebut bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, *board size* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional yang diukur oleh kepemilikan saham institusi, *board size* diukur dengan menjumlahkan seluruh dewan komisaris dan dewan direksi suatu perusahaan dan *leverage* diukur dengan DER. Populasi dari penelitian tersebut adalah Industri Keuangan Non Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2014-2018. Teknik pengambilan Sampel dengan *purposive sampling* dan diperoleh 16 perusahaan yang digunakan sebagai sampel. Metode Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, *board size* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dan *leverage* berpengaruh *negative* signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian secara simultan kepemilikan institusional, *board size* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Perusahaan diharapkan dapat lebih efektif mengelola aset yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Optimalisasi perusahaan juga perlu dalam mengembangkan usaha dan memperhatikan kelengkapan laporan tahunan/*annual report* disetiap tahunnya. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan kepemilikan instusional, dewan komisaris dan dewan direksi sebagai variabel bebas. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan kinerja keuangan

sedangkan penelitian ini menggunakan kinerja perusahaan sebagai variabel terikat. Perbedaan lainnya yaitu populasi perusahaan dan periode penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020) penelitian tersebut dilakukan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan peran *corporate governance*. Dengan tata kelola perusahaan yang baik kinerja perusahaan dapat bertumbuh. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan CG yang baik melalui keberadaan dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dalam meningkatkan kinerja. Dalam penelitian tersebut kinerja perusahaan diukur dengan *Tobin's q*. Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kinerja perusahaan yang diukur dengan *tobin's*. Persamaan lainnya yaitu sama-sama menggunakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menggunakan periode penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, dkk (2020) penelitian berikut merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap nilai

perusahaan. Variabel independen yang termasuk dalam penelitian tersebut adalah komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional sebagai proksi dari *Good Corporate Governance*. *Return on Equity* (ROE) sebagai *proxy* dari Kinerja Keuangan. Tobins'Q digunakan untuk mengukur nilai perusahaan sebagai variabel independen. Sampel yang termasuk dalam penelitian tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2018. Metode Sampel Purposif digunakan untuk memilih sampel. Sudah diperoleh 22 BUMN semua sektor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan ROE tidak berdampak terhadap nilai perusahaan. Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional sebagai proxy dari GCG. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan nilai perusahaan sedangkan penelitian ini menggunakan kinerja perusahaan sebagai variabel terikat. Perbedaan lainnya yaitu sampel perusahaan dan periode penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Pudjongo dan Yuliati (2020) penelitian tersebut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dan Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data laporan

keuangan tahunan yang diperoleh dari situs resmi perusahaan. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Variabel GCG diproksikan dengan variabel Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit. Variabel Kinerja Keuangan diproksikan dengan rasio *Return on Assets* (ROA) dan Nilai Perusahaan dengan *Tobin's q* Ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian secara parsial variabel Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan. Proporsi Komisaris Independen berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, tetapi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Pengujian secara simultan menunjukkan ketiga variabel independen berpengaruh kepada variabel Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel GCG diproksikan dengan komite audit dan dewan komisaris. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan sedangkan penelitian ini hanya menggunakan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen. Perbedaan lainnya yaitu pada periode penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusnaldi, dkk (2020) penelitian tersebut bertujuan untuk menguji efek jumlah dewan direksi dan jumlah komite audit terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut adalah penelitian sampel, yakni memasukan 111 perusahaan sektor manufaktur selama tahun pengamatan 2017-2019 dengan kriteria tertentu. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data

panel fixed effect model. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan dewan direksi dan komite audit sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi data *panel fixed effect* model sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Perbedaan lainnya yaitu pada lokasi perusahaan dan periode penelitian yang berbeda.

